

The Influence Of Trust Building, Face-To-Face Dialogue, Process Commitment, Shared Understanding, And Initial Outcomes On The Success Of Collaborative Governance Across All Urban Villages In Banjarbaru City

Pengaruh Pembangunan Kepercayaan, Dialog Tatap Muka, Komitmen Proses, Serta Pemahaman Bersama Dan Hasil Awal Terhadap Keberhasilan Tata Kelola Kolaboratif Se Kelurahan Kota Banjarbaru

Anindya Risa Destiana¹, Mahyuni², Samahuddin³, Netty Herawaty⁴

Universitas Lambung Mangkurat, Banjarmasin, Indonesia^{1,2,3,4}

langitanindy@gmail.com¹, mahyuni.fisip@ulm.ac.id², samahuddin_m@yahoo.com³,
Nettyherawaty.fisip@ulm.ac.id⁴

**Corresponding Author*

ABSTRACT

This study aims to analyze the effects of trust building, face-to-face dialogue, commitment to process, and shared understanding with intermediate outcomes on collaborative governance success across all urban villages in Banjarbaru City. This research employs a quantitative explanatory survey design. Data were collected through questionnaires from collaborative actors at the village level and analyzed using multiple linear regression to examine both partial and simultaneous relationships among variables. The results show that trust building has a positive and significant effect on collaborative governance success, indicating that inter-actor trust, transparency, and accountability are key drivers of effective collaboration. Face-to-face dialogue demonstrates a significant negative relationship, suggesting that intensive interactions without clear direction and follow-up may reduce collaborative effectiveness. Commitment to process does not show a significant partial effect, indicating that procedural commitment mainly functions as a supporting mechanism rather than a direct determinant of outcomes. Shared understanding and intermediate outcomes exhibit a significant negative effect, implying that unmanaged preliminary agreements may create excessive expectations and hinder final outcomes. Simultaneously, all variables significantly influence collaborative governance success, confirming that collaborative governance operates as an integrated and dynamic system where relational, communicative, and procedural dimensions interact to shape policy outcomes.

Keywords: Collaborative Governance; Trust Building, Face-to-Face Dialogue, Process Commitment, Shared Understanding, Intermediate Outcome.

ABSTRAK

Studi ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh pembangunan kepercayaan, dialog tatap muka, komitmen terhadap proses, dan pemahaman bersama dengan hasil antara terhadap keberhasilan tata kelola kolaboratif di seluruh kelurahan perkotaan di Kota Banjarbaru. Penelitian ini menggunakan desain survei eksploratif kuantitatif. Data dikumpulkan melalui kuesioner dari aktor kolaboratif di tingkat kelurahan dan dianalisis menggunakan regresi linier berganda untuk menguji hubungan parsial dan simultan antar variabel. Hasil menunjukkan bahwa pembangunan kepercayaan memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap keberhasilan tata kelola kolaboratif, menunjukkan bahwa kepercayaan antar aktor, transparansi, dan akuntabilitas merupakan pendorong utama kolaborasi yang efektif. Dialog tatap muka menunjukkan hubungan negatif yang signifikan, menunjukkan bahwa interaksi intensif tanpa arahan dan tindak lanjut yang jelas dapat mengurangi efektivitas kolaborasi. Komitmen terhadap proses tidak menunjukkan pengaruh parsial yang signifikan, menunjukkan bahwa komitmen prosedural terutama berfungsi sebagai mekanisme pendukung daripada penentu langsung hasil. Pemahaman bersama dan hasil antara menunjukkan pengaruh negatif yang signifikan, menyiratkan bahwa kesepakatan awal yang tidak dikelola dapat menciptakan ekspektasi yang berlebihan dan menghambat hasil akhir. Secara bersamaan, semua variabel secara signifikan memengaruhi keberhasilan tata kelola kolaboratif, menegaskan bahwa tata kelola kolaboratif beroperasi sebagai sistem terintegrasi dan

dinamis di mana dimensi relasional, komunikatif, dan prosedural berinteraksi untuk membentuk hasil kebijakan.

Kata kunci: Tata Kelola Kolaboratif; Membangun Kepercayaan, Dialog Tatap Muka, Komitmen Proses, Pemahaman Bersama, Hasil Antara.

1. Pendahuluan

Kota Banjarbaru resmi ditetapkan sebagai ibu kota Provinsi Kalimantan Selatan berdasarkan Undang-Undang Nomor 82 Tahun 2022 yang menggantikan Kota Banjarmasin. Kecamatan dan kelurahan sebagai garda terdepan pelayanan publik masih menghadapi keterbatasan sumber daya, lemahnya koordinasi, serta belum optimalnya pelaksanaan kewenangan (Gunawan, 2014). Tumpang tindih peran antar pemangku kepentingan menjadi salah satu penghambat utama dalam proses kerja kolaboratif (Garvera et al., 2021). Koordinasi antar lembaga yang lemah juga berpotensi memperlambat pengambilan keputusan akibat kesenjangan otoritas yang tidak terkelola dengan baik (Abdillah, 2024).

Permasalahan tumpang tindih kewenangan dalam administrasi pertanahan dan penerbitan sertifikat hak milik menunjukkan lemahnya integrasi data dan prosedur antarinstansi (Jurnal Bhumi STPN, 2020). Konflik kewenangan juga terlihat dalam sengketa lahan antara warga dan institusi militer di wilayah Gunung Kupang yang mendorong rekomendasi pembentukan satgas penyelesaian sengketa (KanalKalimantan.com, 2024). Studi implementasi kolaborasi menunjukkan bahwa keterlibatan masyarakat yang rendah dan pembagian peran yang tidak jelas menyebabkan kolaborasi sulit berjalan efektif (Gemilang, 2025). Hambatan budaya organisasi serta resistensi terhadap perubahan turut memperkuat dominasi pola kerja sektoral dalam tata kelola lokal (Unismuh, 2021).

Upaya penguatan kolaborasi dilakukan melalui forum Musrenbang dan CSR/TJSP untuk mempertemukan pemerintah, dunia usaha, dan masyarakat dalam perencanaan pembangunan (Media Center Banjarbaru, 2024). Konsep pembangunan wilayah menegaskan bahwa tanggung jawab pembangunan tidak hanya berada pada pemerintah, tetapi juga masyarakat dan sektor swasta (Lestari & Yulyana, 2022). Pelaksanaan Musrenbang di beberapa kelurahan belum sepenuhnya memenuhi harapan masyarakat karena sejumlah usulan prioritas belum terealisasi (Data Musrenbang Sungai Besar, 2025). Pembangunan kepercayaan publik menuntut akuntabilitas serta pelibatan masyarakat secara aktif dalam setiap tahapan program pembangunan (Ramdhani, 2020).

Inisiatif Lima Pilar Kelurahan dirancang untuk menyatukan peran Camat, Lurah, TP-PKK, LPM, Babinsa, dan Bhabinkamtibmas dalam memperkuat tata kelola kelurahan (Data Epdeskel, 2024–2025). Capaian evaluasi perkembangan kelurahan menunjukkan variasi nilai pada bidang pemerintahan, kewilayahan, dan kemasyarakatan di Kota Banjarbaru (Dinas DP3PMP2KB, 2025). Keberhasilan tata kelola kolaboratif sangat dipengaruhi oleh pembangunan kepercayaan sebagai fondasi utama interaksi antaraktor (Ansell & Gash, 2008). Kurangnya kesamaan visi dan perbedaan persepsi peran antaraktor masih menjadi hambatan dalam membangun kolaborasi yang efektif dan berkelanjutan (Analisis Peran Kebijakan, 2025).

2. Tinjauan Pustaka

Tata Kelola Pemerintahan yang Baik

Tata Kelola Pemerintahan yang Baik merupakan cara penyelenggaraan pemerintahan yang menekankan efektivitas, transparansi, akuntabilitas, dan keadilan dalam pengelolaan urusan publik (UNDP, 2018). Penerapan prinsip transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi terbukti meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pengelolaan dana desa (The Effects of Good Governance Principles, 2025). Transparansi dan akuntabilitas berfungsi sebagai instrumen strategis untuk mencegah penyimpangan dan meningkatkan kinerja organisasi publik (Enhancing Good Governance and Fraud Prevention, 2025). Indikator partisipasi,

responsivitas, efektivitas, efisiensi, dan rule of law menjadi pedoman praktis dalam mengukur kualitas tata kelola pemerintahan (Khan & Ahmad, 2024). Akuntabilitas dan transparansi diposisikan sebagai prinsip utama dalam menjaga integritas pemerintahan (Ahsan & Alam, 2023). Partisipasi warga dalam pengambilan keputusan meningkatkan kualitas hasil kebijakan publik (Ahmed & Rahman, 2022). Pemerintahan yang responsif terhadap aspirasi masyarakat memperkuat legitimasi dan kepercayaan publik (Situngkir, 2021).

Tata Kelola Kolaboratif Pemerintah

Kolaborasi dipahami sebagai kerja bersama lintas batas sektor untuk mencapai tujuan publik yang tidak dapat dicapai secara individual (O'Leary, 2020). Collaborative Governance terjadi ketika lembaga publik melibatkan aktor non-negara dalam proses pengambilan keputusan kolektif yang formal dan deliberatif (Ansell & Gash, 2007). Proses kolaboratif menekankan pentingnya dialog, pembangunan kepercayaan, komitmen, dan pemahaman bersama sebagai inti keberhasilan kolaborasi (Ansell & Gash, 2008). Tata kelola kolaboratif merupakan struktur dan proses pengambilan keputusan publik yang melibatkan aktor lintas sektor secara konstruktif (Emerson & Nabatchi, 2015). Aktor dalam kolaborasi berperan aktif membentuk proses dan hasil melalui negosiasi dan pembelajaran bersama (Mutonyi & Mdee, 2024). Efektivitas kolaborasi lokal dipengaruhi oleh kemampuan aktor dalam mengelola ketimpangan kekuasaan dan menjaga komitmen terhadap tujuan bersama (Lee, 2022).

Aktor Kolaborasi di Tingkat Kelurahan

Kolaborasi di tingkat kelurahan mencerminkan sinergi vertikal dan horizontal antaraktor pemerintahan dan masyarakat (Lestari, 2022). Aparat keamanan berperan menjaga stabilitas sosial dan mendukung keberhasilan program kolaboratif (Setiawan & Fitriyah, 2023). Organisasi kemasyarakatan menjadi fasilitator partisipasi warga dalam pembangunan lokal (Wulandari & Fathoni, 2021). Jejaring sosial di tingkat RT dan RW memperkuat kepercayaan serta komunikasi kolaboratif (Pratama & Nurdin, 2023).

Proses Kolaborasi

Proses kolaboratif merupakan inti model Collaborative Governance yang membentuk kualitas hubungan dan hasil kebijakan (Ansell & Gash, 2008). Dialog, kepercayaan, komitmen, dan pemahaman bersama membentuk siklus dinamis dalam kolaborasi publik (Ansell & Gash, 2008). Dinamika kolaborasi berkembang melalui komunikasi berulang dan pemecahan masalah bersama (Emerson, Nabatchi, & Balogh, 2012).

Pembangunan Kepercayaan

Pembangunan kepercayaan menjadi variabel kunci dalam keberhasilan kolaborasi publik (Ansell & Gash, 2007). Kepercayaan berkembang melalui interaksi konsisten dan komunikasi terbuka antaraktor (Cairney, 2024). Kepercayaan pada fase awal kolaborasi memperkuat komitmen dan kesepahaman tujuan (Grootjans et al., 2022). Transparansi informasi meningkatkan efektivitas kolaborasi lintas sektor (Cho et al., 2023). Kepercayaan memperkuat capacity for joint action dalam tata kelola kolaboratif (Krczal, 2024).

Dialog Tatap Muka

Dialog tatap muka menjadi titik awal pembentukan kolaborasi publik (Ansell & Gash, 2008). Interaksi langsung memperkuat proses deliberatif dalam pengambilan keputusan bersama (Calò, 2024). Komunikasi langsung mempercepat pertumbuhan kepercayaan interpersonal antaraktor (Cho et al., 2023). Pertemuan tatap muka membantu pembentukan persepsi bersama mengenai masalah publik (Haapasaari, 2024). Dialog setara meningkatkan legitimasi proses kebijakan kolaboratif (Cairney, 2024).

Komitmen Proses

Komitmen terhadap proses menentukan keberlanjutan kolaborasi jangka panjang (Ansell & Gash, 2007). Komitmen mencerminkan kesediaan aktor untuk tetap terlibat meskipun menghadapi tantangan (Calò, 2024). Keberlanjutan kolaborasi dipengaruhi oleh partisipasi aktif dalam forum deliberatif (Cho et al., 2023). Komitmen kolektif meningkatkan koordinasi lintas sektor dalam pelaksanaan kebijakan (Khan, Ahmed, & Malik, 2024). Kepemimpinan yang menjaga keadilan prosedural memperkuat rasa kepemilikan bersama dalam kolaborasi (Cairney, 2024).

3. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan desain survei untuk menguji hubungan kausal antarvariabel secara objektif dan terukur (Creswell, 2018; Adcock & Collier, 2017; Sugiyono, 2016). Tipe penelitian eksplanatori dipilih untuk menjelaskan pengaruh Pembangunan Kepercayaan, Dialog Tatap Muka, Komitmen Proses, serta Kesepahaman Bersama dan Intermediate Outcomes terhadap Keberhasilan Tata Kelola Kolaboratif di Kelurahan melalui pengujian hipotesis statistik (Sekaran & Bougie, 2020). Penelitian dilaksanakan pada seluruh kelurahan di Kota Banjarbaru dengan populasi 826 aktor kolaborasi yang terdiri atas Camat, Lurah, Babinsa, Bhabinkamtibmas, Ketua PKK, Ketua LPM, serta Ketua RT dan RW berdasarkan data administratif tahun 2024.

Teknik sampling menggunakan non-probability purposive sampling dengan penentuan ukuran sampel melalui rumus Slovin pada tingkat signifikansi 5 persen sehingga diperoleh 270 responden (Creswell, 2018; Etikan, Musa, & Alkassim, 2016; Sekaran & Bougie, 2020). Kelompok strategis seperti Camat, Lurah, Babinsa, Bhabinkamtibmas, Ketua PKK, dan Ketua LPM diikutsertakan seluruhnya untuk menjaga kelengkapan perspektif kelembagaan (Neuman, 2014; Creswell, 2018). Instrumen penelitian menggunakan kuesioner skala Likert lima poin (Sugiyono, 2016) dengan uji validitas Product Moment Pearson dan kriteria $r > 0,3$ (Nunnally dalam Ghozali, 2005), serta uji reliabilitas Cronbach Alpha $\geq 0,6$ (Ghozali, 2005).

Analisis data menggunakan regresi linier berganda dengan bantuan SPSS 20.0 untuk menguji pengaruh parsial dan simultan variabel independen terhadap variabel dependen. Pengujian dilakukan melalui uji asumsi klasik yang mencakup multikolinieritas dengan kriteria VIF < 10 dan tolerance mendekati 1 (Santoso, 2012), autokorelasi menggunakan Durbin-Watson (Ghozali, 2013), heteroskedastisitas melalui grafik residual (Ghozali, 2013), dan normalitas dengan histogram serta normal probability plot (Ghozali, 2013). Pengujian hipotesis menggunakan uji F, uji t, serta koefisien determinasi (R^2) pada tingkat signifikansi 5 persen untuk menilai kekuatan dan arah pengaruh antarvariabel.

4. Hasil dan Pembahasan

Hasil Uji Korelasi

Uji korelasi digunakan untuk mengetahui ada tidaknya hubungan antara dua variabel berdasarkan tingkat signifikansi, dengan ketentuan sebagai berikut :

- a. Jika nilai $r\text{-hitung} \geq r\text{-tabel}$ ($\alpha=0,05$), (terdapat hubungan/korelasi)
- b. Jika nilai $r\text{-hitung} < r\text{-tabel}$ ($\alpha=0,05$), (tidak ada hubungan/korelasi)

Adapun hasil uji korelasi masing-masing variabel independen terhadap variabel dependen adalah sebagai berikut :

Tabel 1. Hasil uji korelasi Pembangunan Kepercayaan terhadap Keberhasilan Collaboration

Correlations			
	X1	Y	
Pearson Correlation	1		.594*
1		*	

	Sig. (2-tailed)	.000
N	270	270
Pearson Correlation	.594**	1
Sig. (2-tailed)	.000	
N	270	270

** . Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

Berdasarkan hasil uji korelasi diketahui bahwa untuk variabel Pembangunan Kepercayaan (X1) dengan Keberhasilan Kolaborasi (Y) uji korelasi person $r_{hitung} = 0,594 > r_{tabel} = 0,119$ dengan taraf signifikan $0,000 < 0,05$, maka secara uji korelasi dapat disimpulkan bahwa terdapat hubungan positif dan signifikan dengan kekuatan kuat antara Pembangunan Kepercayaan dan Keberhasilan Tata Kelola Kolaboratif di Kelurahan. Artinya, semakin tinggi tingkat pembangunan kepercayaan antaraktor dalam proses kolaborasi, maka semakin tinggi pula tingkat keberhasilan kolaborasi yang dicapai.

Tabel 2 - Hasil uji korelasi Dialog Tatap Muka terhadap Keberhasilan Kolaborasi

Correlations			
		X2	Y
X2	Pearson Correlation	1	-.028**
	Sig. (2-tailed)		.649
	N	270	270
Y	Pearson Correlation	-.028**	1
	Sig. (2-tailed)	-.028	
	N	270	270

** . Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

Berdasarkan hasil uji korelasi diketahui bahwa untuk variabel Dialog Tatap Muka (X2) dengan keberhasilan kolaborasi (Y) uji korelasi person $r_{hitung} = -0,028 < r_{tabel} = 0,119$ dengan taraf signifikan $0,649 < 0,05$, maka secara uji korelasi dapat disimpulkan Tidak terdapat hubungan yang signifikan antara Dialog Tatap Muka dan Keberhasilan Tata Kelola Kolaboratif. Nilai korelasi sangat kecil dan tidak signifikan, sehingga menunjukkan bahwa intensitas dialog tatap muka tidak berhubungan langsung dengan tingkat keberhasilan kolaborasi dalam konteks penelitian ini, kesimpulannya Dialog Tatap Muka bukan prediktor langsung keberhasilan kolaborasi, melainkan kemungkinan berperan secara tidak langsung melalui variabel lain (misalnya *trust* atau *intermediate outcomes*).

Tabel 3. Hasil uji korelasi Komitmen Proses terhadap Keberhasilan Kolaborasi

Correlations			
		X3	Y
X3	Pearson Correlation	1	.0,029**
	Sig. (2-tailed)		.631
	N	270	270
Y	Pearson Correlation	.029**	1
	Sig. (2-tailed)	.631	
	N	270	270

** . Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

Berdasarkan Hasil uji korelasi Komitmen Proses terhadap Keberhasilan Kolaborasi uji korelasi person $r_{hitung} = 0,029 < r_{tabel} = 0,119$ dengan taraf signifikan $0,631 < 0,05$, maka secara uji korelasi dapat disimpulkan bahwa Tidak ditemukan hubungan yang signifikan antara komitmen

terhadap proses dengan keberhasilan tata kelola kolaboratif. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun komitmen dan pemahaman bersama penting secara normatif, dalam konteks empiris penelitian ini keduanya belum secara langsung berkorelasi dengan hasil kolaborasi, dengan kesimpulan Peran X3 cenderung bersifat internal proses, bukan penentu langsung outcome.

Tabel 4 - Hasil uji korelasi Komitmen Proses terhadap Keberhasilan Kolaborasi

Correlations			
		X4	Y
X4	Pearson Correlation	1	.0,055**
	Sig. (2-tailed)		.370
	N	270	270
Y	Pearson Correlation	.055**	1
	Sig. (2-tailed)	.370	
	N	270	270

** . Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

Berdasarkan Hasil uji korelasi Kesepahaman bersama dan hasil awal, terhadap Tata Kelola Kolaboratif uji korelasi person $r_{hitung}=0,055 < r_{tabel}=0,119$ dengan taraf signifikan $0,370 < 0,05$, maka secara uji korelasi dapat disimpulkan bahwa hasil Awal tidak menunjukkan hubungan yang signifikan dengan keberhasilan kolaborasi. Ini mengindikasikan bahwa capaian antara seperti peningkatan kepercayaan atau pembelajaran bersama belum secara langsung tercermin sebagai keberhasilan akhir dalam persepsi responden.

Hasil Uji Hipotesis

Adapun hasil uji hipotesis Pembangunan Kepercayaan, Dialog Tatap Muka, Komitmen Proses, Kesepahaman Bersama dan hasil terhadap keberhasilan kolaborasi adalah sebagai berikut:

Tabel 5. Hasil uji hipotesis

	Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	Sig.
		B	Std. Error	Beta	
1	(Constant)	2.262	.201		.000
	Pembangunan Kepercayaan	1.022	.056	.948	.000
	Dialog Tatap Muka	-.381	.048	-.377	.000
	Komitmen Proses	.020	.032	.038	.523
	shared understanding & Intermediate outcomes	-.272	.054	-.334	.000

Dari hasil uji hipotesis dapat dirumuskan menjadi persamaan regresi berganda yaitu:

$$Y = 2.262 + 1.022X_1 + -0.381X_2 + 0.020X_3 + -0.272X_4$$

Berdasarkan persamaan di atas dapat diketahui bahwa $\beta_1=\beta_2=\beta_3\neq 0$ artinya hipotesis H_a diterima dan H_0 ditolak, yang berarti bahwa ada pengaruh antara Pembangunan Kepercayaan, Dialog Tatap Muka, komitmen process, Kesepahaman Bersama dan hasil

terhadap keberhasilan kolaborasi kelurahan Banjarbaru . Selain itu nilai persamaan tersebut berarti:

1. Konstan positif sebesar 2.262 artinya walaupun tidak ada variabel bebas (X), Perangkat Kelurahan akan melaksanakan tugasnya sebagaimana mestinya karena ia mempunyai tanggungjawab sebagai Pelayan Masyarakat.
2. Nilai signifikansi Pembangunan Kepercayaan (X1) sebesar 0,000 ($< 0,05$) dengan koefisien beta terstandarisasi sebesar 0,948. Hasil ini menunjukkan bahwa Pembangunan Kepercayaan berpengaruh positif dan signifikan terhadap Keberhasilan Tata Kelola Kolaboratif di Kelurahan. Artinya, semakin tinggi tingkat kepercayaan yang terbangun antaraktor kolaborasi, maka semakin tinggi pula tingkat keberhasilan tata kelola kolaboratif. Dengan demikian, hipotesis H1 diterima.
3. Variabel Dialog Tatap Muka (X2) memiliki nilai signifikansi sebesar 0,000 ($< 0,05$) dengan koefisien beta sebesar $-0,377$. Hasil ini menunjukkan bahwa Dialog Tatap Muka berpengaruh signifikan namun berarah negatif terhadap Keberhasilan Kolaborasi Pemerintah. Dengan demikian, hipotesis H2 diterima.

Arah hubungan negatif ini mengindikasikan bahwa intensitas dialog tatap muka yang tidak diimbangi dengan kualitas komunikasi, kesetaraan partisipasi, dan kejelasan tujuan dapat berpotensi menurunkan efektivitas kolaborasi. Hal yang nampak terlihat adalah munculnya kejenuhan apabila dialog ini terlalu sering dilakukan tanpa feedback yang jelas. Temuan ini tidak bertentangan dengan teori, melainkan menunjukkan bahwa dialog tatap muka perlu dikelola secara inklusif dan produktif agar berdampak positif.

4. Nilai signifikansi variabel Komitmen Proses sebesar 0,523 ($> 0,05$) dengan koefisien beta sebesar 0,038. Hasil ini menunjukkan bahwa variabel tersebut tidak berpengaruh signifikan secara parsial terhadap Keberhasilan Kolaborasi Pemerintah. Dengan demikian, hipotesis H3 ditolak.

Temuan ini mengindikasikan bahwa komitmen terhadap proses dan kesamaan pemahaman lebih berperan sebagai mekanisme pendukung proses kolaborasi, bukan sebagai faktor yang secara langsung menentukan keberhasilan akhir. Variabel ini cenderung berfungsi sebagai prasyarat atau mediator dalam hubungan antarvariabel.

5. Variabel Kesepahaman Bersama dan Hasil memiliki nilai signifikansi sebesar 0,000 ($< 0,05$) dengan koefisien beta sebesar $-0,334$. Hasil ini menunjukkan bahwa Intermediate Outcomes berpengaruh signifikan dengan arah negatif terhadap Keberhasilan Kolaborasi Pemerintah. Dengan demikian, hipotesis H4 diterima.

Arah negatif ini menunjukkan bahwa kesepahaman dan hasil-hasil antara yang belum stabil seperti konflik sementara, ketegangan antaraktor, atau ketidakseimbangan manfaat dapat mencerminkan fase transisi dalam proses kolaborasi yang belum sepenuhnya bermuara pada keberhasilan akhir.

Uji F Statistik (Simultan)

Untuk menguji secara simultan Pembangunan Kepercayaan, Dialog Tatap Muka, commitment to precess, Kesepahaman Bersama dan hasil awal terhadap keberhasilan kolaborasi digunakan uji F dengan hasil sebagai berikut.

Tabel 6. Hasil uji F statistik (simultan)

ANOVA ^a					
Model	Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1 Regression	65.911	4	16.478	83.063	.000 ^b
Residual	52.570	265	.198		
Total	118.482	269			

a. Dependent Variable: Y

b. Predictors: (Constant), X4, X2, X1, X3

Berdasarkan hasil uji ANOVA, diperoleh nilai F hitung sebesar 83,063 dengan tingkat signifikansi 0,000. Nilai signifikansi tersebut lebih kecil dari tingkat kesalahan yang ditetapkan ($\alpha = 0,05$). Dengan demikian, model regresi yang digunakan dalam penelitian ini signifikan secara statistik. Karena nilai Sig. < 0,05, maka H_0 ditolak dan H_1 diterima. Artinya, Pembangunan Kepercayaan (X1), Dialog tatap Muka (X2), Komitmen Proses (X3), serta Kesepahaman Bersama dan hasil awal (X4) secara simultan berpengaruh signifikan terhadap Keberhasilan Tata Kelola Kolaboratif (Y). Hasil ini menunjukkan bahwa keberhasilan tata kelola kolaboratif tidak dapat dijelaskan oleh satu faktor tunggal, melainkan merupakan hasil interaksi dan kontribusi bersama dari berbagai aspek proses kolaborasi. Pembangunan Kepercayaan, dialog tatap muka, komitmen terhadap proses, kesamaan pemahaman, serta hasil-hasil antara secara kolektif membentuk dinamika yang memengaruhi tingkat keberhasilan kolaborasi antaraktor.

Uji t Statistik (Parsial)

Hasil uji parsial dengan menggunakan uji t statistik (parsial) yaitu sebagai berikut:

Tabel 7. Hasil uji t statistik (parsial)

	Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	Sig.
		B	Std. Error	Beta	
1	(Constant)	2.262	.201		.000
	Pembangunan Kepercayaan	1.022	.056	.948	.000
	Dialog Tatap Muka	-.381	.048	-.377	.000
	Komitmen Proses	.020	.032	.038	.523
	shared understanding & Intermediate outcomes	-.272	.054	-.334	.000

Berdasarkan hasil uji t statistik (parsial) dapat diketahui bahwa untuk variabel pengaruh Pembangunan Kepercayaan terhadap keberhasilan kolaborasi menunjukkan nilai signifikansi sebesar 0,000 (< 0,05) dengan koefisien beta terstandarisasi sebesar 0,948. Hal ini menunjukkan bahwa Pembangunan Kepercayaan berpengaruh positif dan signifikan terhadap Keberhasilan Tata Kelola Kolaboratif. Artinya, semakin tinggi tingkat kepercayaan yang terbangun di antara aktor kolaborasi, maka semakin tinggi pula keberhasilan tata kelola kolaboratif yang dicapai. Dengan demikian, hipotesis yang menyatakan bahwa Pembangunan Kepercayaan berpengaruh terhadap Keberhasilan Tata Kelola Kolaboratif diterima.

Hasil uji t untuk variabel pengaruh Dialog Tatap Muka terhadap keberhasilan kolaborasi menunjukkan Variabel Dialog Tatap Muka memiliki nilai signifikansi sebesar 0,000 (< 0,05) dengan koefisien beta sebesar -0,377. Hasil ini menunjukkan bahwa Dialog Tatap Muka berpengaruh signifikan terhadap Keberhasilan Kolaborasi Pemerintah, namun dengan arah hubungan negatif. Hal ini mengindikasikan bahwa dialog tatap muka yang tidak dikelola secara efektif misalnya didominasi oleh aktor tertentu atau tidak menghasilkan kesepakatan substantif bahkan terlalu sering dilaksanakan dapat berdampak pada menurunnya keberhasilan Tata Kelola Kolaboratif. Dengan demikian, hipotesis parsial untuk Dialog Tatap Muka diterima.

Hasil uji t untuk variabel Komitmen Proses terhadap keberhasilan Tata Kelola Kolaboratif menunjukkan Nilai signifikansi untuk variabel Komitmen Proses sebesar 0,523 (>

0,05) dengan koefisien beta sebesar 0,038. Hal ini menunjukkan bahwa variabel tersebut tidak berpengaruh signifikan secara parsial terhadap Keberhasilan Kolaborasi Pemerintah. Dengan demikian, hipotesis yang menyatakan adanya pengaruh Komitmen Proses terhadap Keberhasilan Tata Kelola Kolaboratif ditolak.

Temuan ini mengindikasikan bahwa komitmen terhadap proses lebih berfungsi sebagai faktor pendukung atau mekanisme internal dalam proses kolaborasi, namun tidak secara langsung menentukan keberhasilan akhir kolaboratif.

Sementara itu hasil uji t Kesepahaman Bersama dan Hasil Awal terhadap keberhasilan kolaborasi menunjukkan variabel ini memiliki nilai signifikansi sebesar 0,000 ($< 0,05$) dengan koefisien beta sebesar $-0,334$. Hal ini menunjukkan bahwa Kesepahaman Bersama dan hasil berpengaruh signifikan dengan arah negatif terhadap Keberhasilan Kolaborasi Pemerintah. Dengan demikian, hipotesis parsial untuk Kesepahaman Bersama dan hasil diterima.

Arah hubungan negatif ini mengindikasikan bahwa hasil-hasil antara yang belum matang atau belum stabil seperti konflik sementara atau ketidakseimbangan manfaat dapat memengaruhi keberhasilan kolaborasi secara negatif pada tahap tertentu.

Uji Koefisien Determinasi (R^2)

Koefisien determinasi (R^2 atau R^2) digunakan untuk mengetahui besarnya pengaruh – pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen dengan hasil sebagai berikut:

Tabel 8. Hasil uji koefisien determinasi (R^2)

Model Summary ^b					
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	.746 ^a	.556	.550	.44540	1.534

a. Predictors: (Constant), X4, X2, X1, X3

b. Dependent Variable: Y

Hasil uji r square tersebut menunjukkan besaran dari pengaruh variabel X1, X2, X3 dan X4 terhadap keberhasilan kolaborasi determinasi (R^2) sebesar 0.746 dan nilai *adjustment R Square* sebesar 0.556 yang besarnya sumbangan pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen adalah 55,6%. yang berarti bahwa 55,6% variasi Keberhasilan Tata Kelola Kolaboratif dapat dijelaskan oleh variabel Pembangunan Kepercayaan, Dialog Tatap Muka, Komitmen Proses, serta Kesepahaman Bersama dan hasil Awal. Sisanya sebesar 44,4% dipengaruhi oleh faktor lain yang tidak termasuk dalam variabel penelitian ini yang belum diteliti lebih lanjut lagi dan belum dilakukan penelitian secara menyeluruh terhadap keberhasilan kolaborasi.

Pembahasan

Pengaruh Pembangunan Kepercayaan terhadap Keberhasilan Tata Kelola Kolaboratif di Kelurahan

Hasil analisis regresi menunjukkan bahwa **Pembangunan Kepercayaan berpengaruh positif dan signifikan terhadap Keberhasilan Tata Kelola Kolaboratif di Kelurahan**, dengan nilai signifikansi sebesar 0,000 ($< 0,05$) serta koefisien beta terstandarisasi sebesar 0,948. Temuan ini menegaskan bahwa Pembangunan Kepercayaan merupakan faktor yang paling dominan dalam menjelaskan variasi keberhasilan kolaborasi dibandingkan variabel lainnya. Secara empiris, hasil ini menunjukkan bahwa semakin tinggi tingkat kepercayaan antaraktor, maka semakin besar kemungkinan proses kolaborasi menghasilkan outcomes yang efektif, stabil, dan berkelanjutan.

Dominannya peran kepercayaan dalam penelitian ini mengindikasikan bahwa keberhasilan kolaborasi tidak hanya ditentukan oleh keberadaan struktur, forum, atau

mekanisme formal, melainkan sangat bergantung pada kualitas hubungan antaraktor yang terbangun di dalamnya. Kepercayaan memungkinkan aktor-aktor kolaborasi untuk membuka diri, berbagi informasi secara jujur, serta bersedia menanggung risiko bersama dalam proses pengambilan keputusan. Tanpa kepercayaan, kolaborasi cenderung berjalan secara prosedural dan defensif, sehingga sulit menghasilkan dampak kebijakan yang nyata.

Secara teoritis, temuan ini sejalan dengan pandangan Ansell dan Gash (2007) yang menempatkan kepercayaan sebagai fondasi utama dalam *collaborative governance*. Kepercayaan menjadi prasyarat bagi aktor-aktor yang terlibat untuk bersedia berbagi sumber daya, mengurangi sikap saling curiga, serta membangun komitmen bersama terhadap tujuan kolaborasi. Emerson dan Nabatchi (2015) juga menegaskan bahwa trust berfungsi sebagai mekanisme sosial yang menurunkan biaya transaksi, memperkuat legitimasi proses kolaboratif, serta meningkatkan kapasitas kolaborasi dalam menghasilkan keputusan yang dapat diterima bersama.

Dalam konteks empiris Kota Banjarbaru, temuan ini merefleksikan realitas kolaborasi pemerintahan di tingkat kelurahan yang sangat bergantung pada hubungan interpersonal dan institusional antaraktor. Kolaborasi yang melibatkan pemerintah kelurahan, perangkat wilayah, serta pemangku kepentingan lokal cenderung lebih efektif ketika didukung oleh kepercayaan yang dibangun secara konsisten melalui komunikasi terbuka, kejelasan peran, serta kesesuaian antara keputusan yang diambil dan tindakan yang dilaksanakan. Kepercayaan yang tumbuh dari pengalaman kerja bersama dan konsistensi kebijakan memungkinkan kolaborasi berjalan lebih cair, adaptif, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.

Sebaliknya, ketika kepercayaan antaraktor lemah, proses kolaborasi berpotensi mengalami stagnasi meskipun forum dan mekanisme koordinasi telah tersedia. Aktor-aktor cenderung bersikap berhati-hati, membatasi informasi, dan lebih mengutamakan kepentingan sektoral. Kondisi ini menghambat terwujudnya kesepakatan substantif dan melemahkan capaian kolaborasi. Oleh karena itu, hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kepercayaan bukan hanya prasyarat awal, tetapi juga merupakan faktor penentu yang secara langsung memengaruhi keberhasilan tata kelola kolaboratif di Kelurahan.

Pengaruh Dialog tatap Muka terhadap Keberhasilan Tata Kelola Kolaboratif di Kelurahan

Hasil uji parsial menunjukkan bahwa Dialog Tatap Muka berpengaruh signifikan terhadap Keberhasilan tata kelola Kolaboratif di Kelurahan, dengan nilai signifikansi sebesar 0,000 ($< 0,05$). Namun demikian, koefisien beta terstandarisasi bernilai negatif sebesar $-0,377$, yang menunjukkan adanya hubungan berlawanan arah antara intensitas dialog tatap muka dan keberhasilan kolaborasi. Temuan ini mengindikasikan bahwa semakin tinggi intensitas dialog tatap muka yang dilakukan, tidak selalu diikuti oleh peningkatan keberhasilan kolaborasi, bahkan dalam kondisi tertentu justru berpotensi menurunkannya.

Temuan ini merefleksikan dinamika kolaborasi pemerintahan di tingkat lokal yang relatif kaya akan forum koordinasi dan pertemuan tatap muka. Dialog antaraktor sering kali berlangsung secara rutin dan berulang dalam berbagai bentuk pertemuan formal. Akan tetapi, intensitas dialog tersebut tidak selalu diiringi dengan kejelasan agenda, batasan waktu, serta mekanisme tindak lanjut yang terstruktur. Akibatnya, dialog cenderung berfokus pada proses komunikasi itu sendiri, sementara pengambilan keputusan substantif dan implementasi kebijakan berjalan relatif lambat.

Kondisi ini sejalan dengan temuan penelitian Cairney (2024) yang menunjukkan bahwa forum dialog yang terlalu sering namun tidak terarah dapat menimbulkan collaborative fatigue atau kelelahan kolaboratif. Dialog yang tidak menghasilkan keputusan konkret, atau didominasi oleh aktor tertentu, berpotensi memperbesar konflik laten, memperpanjang proses pengambilan keputusan, serta menurunkan efektivitas kolaborasi secara keseluruhan. Dalam

situasi seperti ini, dialog yang semula dimaksudkan sebagai sarana pemecahan masalah justru berubah menjadi beban proses yang menghambat pencapaian outcomes.

Temuan ini menjelaskan mengapa dalam penelitian ini dialog tatap muka menunjukkan pengaruh negatif terhadap keberhasilan kolaborasi. Intensitas dialog yang tinggi, tanpa kejelasan arah dan hasil yang diharapkan, berpotensi menimbulkan kejenuhan, menurunkan motivasi aktor, serta menghabiskan sumber daya waktu dan energi yang seharusnya dapat dialokasikan untuk implementasi kebijakan. Selain itu, dialog yang bersifat repetitif dan simbolik juga berisiko memperkuat persepsi bahwa kolaborasi hanya berhenti pada tataran seremonial.

Pengaruh Komitmen Proses terhadap Keberhasilan Tata Kelola Kolaboratif di Kelurahan

Hasil analisis menunjukkan bahwa Komitmen terhadap Proses tidak berpengaruh signifikan secara parsial terhadap Keberhasilan Tata Kelola Kolaboratif di Kelurahan, dengan nilai signifikansi sebesar 0,523 ($> 0,05$). Temuan ini menunjukkan bahwa komitmen aktor dalam mengikuti proses kolaboratif belum secara langsung menentukan keberhasilan hasil akhir kolaborasi. Artinya, meskipun proses kolaborasi berjalan dan para aktor terlibat secara konsisten, kondisi tersebut belum otomatis menghasilkan capaian kolaborasi yang optimal.

Secara konseptual, komitmen terhadap proses merupakan unsur penting dalam menjaga keberlangsungan kolaborasi, khususnya dalam kerja sama yang melibatkan berbagai aktor dengan latar belakang kelembagaan yang berbeda. Emerson dan Nabatchi (2015) menjelaskan bahwa komitmen berfungsi menjaga partisipasi aktor, memastikan interaksi tetap berjalan, serta mencegah kolaborasi terhenti di tengah jalan. Hal ini juga didukung oleh Khan et al. (2024) yang menekankan bahwa komitmen berperan dalam menjaga stabilitas hubungan kerja dan konsistensi interaksi antaraktor.

Namun, hasil penelitian ini menunjukkan bahwa keberadaan komitmen terhadap proses belum tentu menjamin tercapainya hasil kolaborasi. Dalam praktik kolaborasi pemerintahan di tingkat kelurahan, komitmen umumnya diwujudkan melalui kehadiran dalam forum koordinasi, kepatuhan terhadap prosedur, dan kesediaan mengikuti mekanisme yang telah disepakati. Bentuk komitmen ini penting untuk menjaga keberlangsungan proses, tetapi belum sepenuhnya diikuti oleh kemampuan untuk menerjemahkan kesepakatan menjadi tindakan kolaboratif yang berdampak langsung pada hasil kebijakan.

Dalam konteks Kota Banjarbaru, proses kolaborasi antaraktor pemerintahan dan pemangku kepentingan lokal secara umum telah berjalan secara berkelanjutan. Para aktor terbiasa bekerja sama dalam berbagai forum dan kegiatan lintas sektor. Namun, keberlanjutan proses tersebut masih perlu diimbangi dengan penguatan substansi kolaborasi, seperti konsistensi implementasi program, kejelasan pembagian peran, serta pengelolaan capaian antara yang terukur. Kondisi ini menunjukkan bahwa komitmen terhadap proses saat ini lebih berfungsi menjaga hubungan kerja dan stabilitas interaksi, tetapi belum sepenuhnya mendorong pencapaian hasil kolaborasi secara nyata.

Temuan ini sejalan dengan penelitian Calò (2024) yang menyatakan bahwa komitmen terhadap proses lebih berperan sebagai faktor pendukung (*enabling factor*) daripada penentu langsung keberhasilan kolaborasi. Komitmen membuka ruang interaksi dan koordinasi, namun efektivitasnya tetap dipengaruhi oleh faktor lain, seperti kepercayaan antaraktor dan pengelolaan hasil antara yang terarah pada capaian.

Pengaruh Kesepahaman Bersama dan hasil terhadap Keberhasilan Tata Kolaboratif di Kelurahan

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Kesepahaman Bersama dan Hasil Antara (*Shared Understanding and Intermediate Outcomes*) berpengaruh signifikan terhadap Keberhasilan Tata Kelola Kolaboratif di Kelurahan, dengan nilai signifikansi sebesar 0,000 ($< 0,05$) dan

koefisien beta terstandarisasi sebesar $-0,334$. Arah hubungan yang negatif menunjukkan bahwa Hasil memiliki dampak yang tidak linear terhadap keberhasilan akhir kolaborasi. Artinya, keberadaan hasil yang tinggi tidak selalu berbanding lurus dengan peningkatan keberhasilan kolaborasi, bahkan dalam kondisi tertentu justru dapat menghambat pencapaian outcomes akhir.

Secara teoritis, intermediate outcomes dipahami sebagai hasil-hasil sementara yang muncul selama proses kolaborasi, seperti meningkatnya intensitas komunikasi, terbentuknya kesepahaman bersama, serta berkembangnya jaringan kerja antaraktor (Ansell & Gash, 2007). Hasil antara ini pada dasarnya berfungsi sebagai jembatan yang menghubungkan proses kolaboratif dengan outcomes kebijakan yang diharapkan. Namun demikian, Emerson dan Nabatchi (2015) menegaskan bahwa variable Hasil sementara tidak bersifat otomatis, melainkan perlu dikelola secara hati-hati agar benar-benar berkontribusi terhadap capaian akhir kolaborasi.

Dalam konteks empiris Kota Banjarbaru, temuan ini merefleksikan kondisi kolaborasi pemerintahan di tingkat lokal yang relatif berhasil membangun kesepahaman awal dan jejaring kerja antaraktor. Kesepahaman bersama sering kali tercapai melalui forum koordinasi, pertemuan lintas sektor, serta kesepakatan informal yang berkembang selama proses kolaborasi. Namun, kesepahaman tersebut tidak selalu diikuti oleh langkah implementatif yang jelas dan terukur. Akibatnya, Hasil Sementara berhenti pada tataran proses dan simbolik, tanpa mampu mendorong pencapaian outcomes kolaborasi secara konkret.

Arah hubungan negatif juga dapat dijelaskan oleh munculnya ekspektasi yang terlalu tinggi ketika kesepahaman bersama telah terbentuk, sementara kapasitas implementasi dan kejelasan mekanisme kerja belum sepenuhnya siap. Dalam kondisi ini, Hasil sementara justru berpotensi memunculkan ketegangan baru antaraktor, terutama ketika harapan terhadap hasil akhir tidak sejalan dengan realitas pelaksanaan di lapangan. Kondisi semacam ini dapat menurunkan efektivitas kolaborasi dan memperlambat pencapaian tujuan bersama.

Temuan ini sejalan dengan hasil penelitian Haapasari (2024) yang menunjukkan bahwa Kesepahaman Bersama dan hasil sementara yang tidak ditindaklanjuti secara sistematis dapat menciptakan ekspektasi berlebihan, memperbesar konflik laten, dan melemahkan kepercayaan antaraktor. Dengan demikian, Kesepahaman Bersama dan hasil sementara tidak selalu berdampak positif apabila tidak diintegrasikan ke dalam mekanisme implementasi yang jelas, terkoordinasi, dan berorientasi pada hasil.

Pengaruh Pembangunan Kepercayaan, Dialog Tatap Muka, Komitmen Proses, Kesepahaman Bersama dan hasil sementara secara Simultan terhadap Keberhasilan Tata Kelola Kolaboratif

Hasil uji simultan (uji F) menunjukkan bahwa Pembangunan Kepercayaan, Dialog tatap Muka, Komitmen Proses, Kesepahaman Bersama dan hasil sementara secara bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap Keberhasilan Tata Kelola Kolaboratif di Kelurahan. Hal ini ditunjukkan oleh nilai F hitung sebesar 83,063 dengan tingkat signifikansi $0,000 (< 0,05)$. Dengan demikian, hipotesis simultan yang menyatakan bahwa seluruh variabel independen secara kolektif memengaruhi keberhasilan kolaborasi diterima secara statistik.

Temuan ini menegaskan bahwa keberhasilan Tata Kelola Kolaboratif tidak dapat dijelaskan oleh satu variabel tunggal, melainkan merupakan hasil interaksi kompleks antara dimensi relasional (Pembangunan Kepercayaan), dimensi komunikatif (face-to-face dialogue), dimensi komitmen proses, serta hasil antara (intermediate outcomes). Secara konseptual, hal ini sejalan dengan kerangka kerja Tata Kelola Kolaboratif yang dikembangkan oleh Ansell dan Gash (2007), yang memandang kolaborasi sebagai suatu sistem dinamis di mana berbagai elemen saling memperkuat dalam menentukan outcomes kebijakan.

Lebih lanjut, nilai R Square sebesar 0,556 menunjukkan bahwa 55,6% variasi Keberhasilan Tata Kelola Kolaboratif dapat dijelaskan secara simultan oleh keempat variabel

independen, sedangkan sisanya sebesar 4,4% dipengaruhi oleh faktor lain di luar model penelitian. Nilai ini tergolong moderat hingga kuat dalam penelitian sosial, mengingat fenomena kolaborasi kebijakan publik bersifat kompleks dan dipengaruhi oleh banyak faktor kontekstual (Emerson & Nabatchi, 2015).

Secara empiris, temuan ini konsisten dengan penelitian Haapasari (2024) yang menemukan bahwa kombinasi antara trust, komunikasi, dan hasil antara memberikan kontribusi signifikan terhadap keberhasilan kolaborasi lintas sektor. Cho et al. (2023) juga menegaskan bahwa Tata Kelola Kolaboratif yang efektif memerlukan sinergi antara proses interaksi dan kapasitas kelembagaan, bukan sekadar keberadaan forum kolaboratif semata.

Namun demikian, hasil uji simultan ini juga perlu dibaca secara kritis bersama hasil uji parsial. Meskipun secara kolektif seluruh variabel berpengaruh signifikan, tidak semua variabel menunjukkan pengaruh signifikan secara individual. Temuan ini mengindikasikan adanya efek komplementer antarvariabel, di mana beberapa variabel baru menunjukkan kontribusinya ketika dikombinasikan dengan variabel lain dalam satu model. Hal ini memperkuat argumen bahwa Tata Kelola Kolaboratif merupakan proses kolektif yang tidak dapat direduksi menjadi hubungan sebab-akibat linear sederhana.

Secara praktis, hasil ini mengimplikasikan bahwa upaya meningkatkan keberhasilan Tata Kelola Kolaboratif harus dilakukan secara holistik. Penguatan trust tanpa didukung dialog yang efektif, atau pencapaian intermediate outcomes tanpa komitmen proses yang jelas, berpotensi menghasilkan kolaborasi yang rapuh dan tidak berkelanjutan. Oleh karena itu, pembuat kebijakan perlu merancang strategi kolaborasi yang mengintegrasikan seluruh dimensi tersebut secara simultan.

Dalam konteks empiris Kota Banjarbaru, hasil uji simultan ini merefleksikan dinamika kolaborasi pemerintahan di tingkat kelurahan yang berjalan sebagai suatu sistem yang saling terkait, bukan sebagai rangkaian variabel yang berdiri sendiri. Praktik kolaborasi di Banjarbaru menunjukkan bahwa keberhasilan program dan kebijakan kolaboratif umumnya muncul ketika kepercayaan antaraktor, intensitas komunikasi, komitmen terhadap proses, serta capaian antara berkembang secara bersamaan. Ketika salah satu elemen melemah, efektivitas kolaborasi secara keseluruhan cenderung ikut terpengaruh.

Temuan lapangan menunjukkan bahwa kolaborasi antaraktor di Banjarbaru relatif kaya akan interaksi formal maupun informal, mulai dari forum koordinasi, pertemuan lintas sektor, hingga kerja sama berbasis kedekatan wilayah dan relasi kelembagaan. Namun, efektivitas kolaborasi tersebut sangat bergantung pada kemampuan aktor untuk mengelola interaksi tersebut secara terpadu. Kepercayaan yang kuat mendorong keterbukaan dan kemauan bekerja sama, sementara dialog tatap muka berfungsi sebagai sarana penyaluran kepentingan. Pada saat yang sama, komitmen proses dan pengelolaan hasil antara menjadi faktor penentu apakah proses kolaboratif tersebut mampu bergerak dari sekadar kesepakatan menuju implementasi yang nyata.

5. Penutup

Kesimpulan

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pembangunan Kepercayaan berpengaruh positif dan signifikan terhadap Keberhasilan Tata Kelola Kolaboratif, sehingga menjadi faktor paling dominan dalam mendorong efektivitas kolaborasi di tingkat kelurahan melalui keterbukaan, konsistensi, kejujuran, dan akuntabilitas antaraktor. Dialog Tatap Muka berpengaruh signifikan dengan arah negatif, yang menunjukkan bahwa intensitas pertemuan yang tinggi tanpa pengelolaan dan tindak lanjut yang jelas dapat menurunkan efektivitas kolaborasi. Komitmen Proses tidak berpengaruh signifikan secara parsial, sehingga berperan sebagai faktor pendukung yang efektivitasnya bergantung pada variabel lain. Kesepahaman Bersama dan Hasil Awal berpengaruh signifikan dengan arah negatif, yang mengindikasikan bahwa hasil

awal yang tidak dikelola secara sistematis dapat memunculkan ekspektasi berlebihan dan potensi konflik. Pengujian simultan menunjukkan seluruh variabel berpengaruh signifikan terhadap Keberhasilan Tata Kelola Kolaboratif, yang menegaskan bahwa keberhasilan kolaborasi merupakan hasil interaksi berbagai dimensi proses kolaboratif yang saling berkaitan.

Ucapan Terima Kasih

Penulis menyampaikan terima kasih kepada seluruh responden dan para aktor kolaborasi di tingkat kelurahan Kota Banjarbaru yang telah berpartisipasi dalam penelitian ini, serta kepada Magister Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lambung Mangkurat atas dukungan akademik dan fasilitas penelitian yang diberikan. Apresiasi juga disampaikan kepada semua pihak yang telah memberikan bantuan, masukan, dan dukungan sehingga penelitian ini dapat terselesaikan dengan baik.

Daftar Pustaka

- Abdillah, A. (2024). Koordinasi antar lembaga dalam tata kelola kolaboratif. *Jurnal Administrasi Publik*, 15(2), 45–60.
- Adcock, R., & Collier, D. (2017). Measurement validity: A shared standard for qualitative and quantitative research. *American Political Science Review*, 95(3), 529–546.
- Ahmed, S., & Rahman, M. (2022). Citizen participation improves the quality of governance outcomes when decision-making is inclusive and deliberative. *Public Management Review*, 24(3), 321–339.
- Ahsan, K., & Alam, M. (2023). Accountability and transparency as pillars of good governance. *International Journal of Public Administration*, 46(5), 389–402.
- Ansell, C., & Gash, A. (2007). Collaborative governance in theory and practice. *Journal of Public Administration Research and Theory*, 18(4), 543–571.
- Ansell, C., & Gash, A. (2008). Collaborative governance in theory and practice. *Journal of Public Administration Research and Theory*, 18(4), 543–571.
- Avoyan, E. (2024). Effectiveness of village fund management in economic and infrastructure development. *Journal of Rural Studies*, 89, 112–125.
- Bae, B. (2024). The effect of collaborative governance in social startups on social performance. *Social Enterprise Journal*, 20(1), 78–95.
- Calò, F. (2024). The role of deliberative dialogue in collaborative governance. *Public Administration Review*.
- Cairney, P. (2024). Trust and collaboration in public policy. *Policy & Politics*, 52(1), 1–20.
- Cho, Y., Noh, J., Roggio, A., & Luna-Reyes, L. (2023). Trust building in cross-sector collaboration: Evidence from food policy networks. *Journal of Public Administration Research and Theory*, 33(2), 234–250.
- Creswell, J. W. (2018). *Research design: Qualitative, quantitative, and mixed methods approaches* (5th ed.). Sage Publications.
- Dianty, S. (2025). Effectiveness of collaboration between government and BPD in village infrastructure development. *Jurnal Ilmu Pemerintahan*, 12(1), 88–102.
- Dinas DP3PMP2KB Kota Banjarbaru. (2025). *Laporan evaluasi perkembangan kelurahan Kota Banjarbaru*.
- Emerson, K., & Nabatchi, T. (2015). *Collaborative governance regimes*. Georgetown University Press.
- Emerson, K., Nabatchi, T., & Balogh, S. (2012). An integrative framework for collaborative governance. *Journal of Public Administration Research and Theory*, 22(1), 1–29.
- Enhancing good governance and fraud prevention in public organizations. (2025). *International Journal of Public Sector Management*.

- Etikan, I., Musa, S. A., & Alkassim, R. S. (2016). Comparison of convenience sampling and purposive sampling. *American Journal of Theoretical and Applied Statistics*, 5(1), 1–4.
- Garvera, E., et al. (2021). Collaborative governance and stakeholder overlap. *Public Administration Review*, 81(4), 654–667.
- Gemilang, A. (2025). Implementasi kolaborasi dalam kebijakan publik. *Jurnal Kebijakan Publik*, 10(2), 134–150.
- Ghozali, I. (2005). *Aplikasi analisis multivariate dengan program SPSS*. Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Ghozali, I. (2013). *Aplikasi analisis multivariate dengan program IBM SPSS 21*. Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Grootjans, S., et al. (2022). Trust building in early stages of cross-sector collaboration. *Public Management Review*, 24(5), 721–740.
- Gunawan, A. (2014). Tata kelola pelayanan publik di tingkat kecamatan. *Jurnal Administrasi Publik*, 8(1), 22–35.
- Haapasaari, A. (2024). Sustainability and collaborative governance in environmental policy. *Environmental Policy and Governance*, 34(1), 45–60.
- Hartati, S., & Nugroho, R. (2020). Evaluasi implementasi inovasi layanan publik berbasis kolaborasi di tingkat kelurahan. *Jurnal Ilmu Pemerintahan*, 7(2), 145–160.
- Irsyad, M., dkk. (2020). Kolaborasi dalam program inovasi pembangunan dan pemberdayaan kewilayahan di Kelurahan Babakan Ciparay. *Jurnal Pemerintahan dan Pembangunan*, 12(2), 98–115.
- Khan, M., & Ahmad, S. (2024). Indicators of good governance and institutional performance. *Governance Studies Quarterly*, 19(1), 55–72.
- Khan, R., Ahmed, T., & Malik, S. (2024). Collective commitment in cross-sector policy implementation. *Policy Studies Journal*, 52(2), 201–220.
- Krczal, A. (2024). Trust and capacity for joint action in collaborative governance. *Public Policy and Administration Review*, 12(1), 33–49.
- Lee, S. (2022). Managing power asymmetry in collaborative governance. *Public Administration Quarterly*, 46(3), 356–380.
- Lestari, R. (2022). Sinergi aktor dalam tata kelola pemerintahan kelurahan. *Jurnal Administrasi Negara*, 10(1), 77–90.
- Lestari, R., & Yulyana, E. (2022). Konsep pembangunan wilayah berbasis kolaborasi. *Jurnal Pembangunan Daerah*, 5(2), 45–60.
- Media Center Banjarbaru. (2024). Forum Musrenbang dan penguatan CSR/TJSP Kota Banjarbaru.
- Mutonyi, M., & Mdee, A. (2024). Actor roles and negotiated outcomes in collaborative governance. *Development Policy Review*, 42(1), 90–108.
- Neuman, W. L. (2014). *Social research methods: Qualitative and quantitative approaches* (7th ed.). Pearson.
- O’Leary, R. (2020). Collaborative public management: Where have we been and where are we going? *American Review of Public Administration*, 50(6–7), 635–646.
- Ramdhani, A. (2020). Akuntabilitas dan partisipasi publik dalam pembangunan daerah. *Jurnal Administrasi Publik*, 14(1), 11–25.
- Santoso, S. (2012). *Analisis SPSS pada statistik parametrik*. Elex Media Komputindo.
- Sekaran, U., & Bougie, R. (2020). *Research methods for business: A skill-building approach* (8th ed.). Wiley.
- Situngkir, H. (2021). Responsivitas pemerintah daerah dalam pelayanan publik. *Jurnal Governance*, 9(2), 120–134.
- Sugiyono. (2016). *Metode penelitian kuantitatif, kualitatif, dan R&D*. Alfabeta.

- UNDP. (2018). *Good governance and sustainable human development*. United Nations Development Programme.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 82 Tahun 2022 tentang Pembentukan Kota Banjarbaru sebagai Ibu Kota Provinsi Kalimantan Selatan.
- Wulandari, D., & Fathoni, A. (2021). Peran organisasi kemasyarakatan dalam pembangunan lokal. *Jurnal Sosial dan Politik*, 3(2), 101–118.